

Komunikasi Partisipatif Pokdarwis dalam Pengembangan Desa Wisata Payung-Payung, Kabupaten Berau

Mesy Ardila¹, Rina Juwita², Kezia Arum Sary³, Ziya Ibrizah⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji komunikasi partisipatif Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Batu Payung dalam pengembangan Desa Wisata Payung-Payung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Penelitian ini dilatarbelakangi pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata, termasuk perlunya melihat proses komunikasi antara Pokdarwis dan masyarakat. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengidentifikasi komunikasi partisipatif yang dilakukan Pokdarwis Batu Payung dalam pengembangan Desa Wisata Payung-Payung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus instrumental. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi serta dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Teori yang digunakan adalah *Dialogic Theory of Public Relations* dari Kent dan Taylor (2002), dengan indikator komunikasi partisipatif dari Tufte dan Mefalopulos (2009) terdiri dari *dialogue*, *voice*, *liberating pedagogy*, dan *action-reflection-action*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi partisipatif Pokdarwis Batu Payung telah terpenuhi secara struktural melalui keempat indikator tersebut. *Dialogue* berlangsung melalui musyawarah, rapat, komunikasi informal, dan media digital. *Voice* terlihat dari penyampaian aspirasi masyarakat yang sebagian diwujudkan dalam program. *Liberating pedagogy* berlangsung melalui pelatihan sesuai potensi lokal. *Action-reflection-action* terlihat melalui evaluasi dan tindak lanjut. Namun, komunikasi belum sepenuhnya inklusif dan merata, ditandai adanya kesenjangan informasi, keterlibatan perempuan dan pemuda yang belum merata, serta belum optimalnya koordinasi antara Pokdarwis dan BUMK yang dipengaruhi oleh ego sektoral antarlembaga. Penelitian selanjutnya, dapat mengkaji pemanfaatan media digital dan keterlibatan pemuda serta perempuan dalam pengambilan keputusan pengembangan desa wisata.

Kata-kata Kunci: Komunikasi Partisipatif; Pokdarwis; Desa Wisata; Dialogic Theory of Public Relations; Pengembangan Pariwisata

Participatory Communication of Pokdarwis in the Development of Payung-Payung Tourism Village, Berau

ABSTRACT

The study examines the participatory communications of the Batu Payung Tourism Awareness Group (Pokdarwis) in the development of the Payung-Payung Tourism Village in Berau Regency, East Kalimantan. The study was motivated by the importance of community involvement in the development of tourism villages, including the need to examine the communication process between Pokdarwis and the community. The study aims to describe, analyze, and identify the participatory communication carried out by the Batu Payung Pokdarwis in the development of the Payung-Payung Tourism Village. The study employs a qualitative approach using an instrumental case study design. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation and analyzed using the Miles and Huberman model. The theoretical framework employed was the Dialogic Theory of Public Relations by Kent and Taylor (2002), with indicators of participatory communication from Tufte and Mefalopulos (2009), which consist of dialogue, voice, liberating pedagogy, and action-reflection-action. The research results indicate that the participatory communication of the Batu Payung Pokdarwis has been structurally fulfilled through these four indicators. Dialogue takes place through deliberations, meetings, informal communication, and digital media. Voice is evident in the expression of community aspirations, some of which are realized in program activities. Liberating pedagogy is implemented through training tailored to local potential. The action-reflection-action cycle is evident through the evaluation and follow-up. However, communication is not yet fully inclusive and equitable, as evidenced by information gaps, unequal participation of women and youth, and suboptimal coordination between Pokdarwis and BUMK, which is influenced by inter-institutional sectoral ego. Future research could examine the use of digital media and the involvement of youth and women in decision-making regarding the development of tourism villages.

Keywords: Participatory Communication; Pokdarwis; Tourism Village; Dialogic Theory of Public Relations; Tourism Development

PENDAHULUAN

Komunikasi pada hakikatnya merupakan proses pertukaran informasi antarindividu maupun antarkelompok dalam berbagai konteks sosial. Effendi dkk. (2024) menjelaskan bahwa proses komunikasi kini mengalami pergeseran dari yang awalnya bersifat satu arah menjadi proses interaktif dan transaksional (dua arah atau lebih) yang menekankan partisipasi aktif. Dalam konteks tersebut, komunikasi dua arah memberikan ruang kepada pihak yang terlibat untuk menyampaikan pendapat, bertukar informasi, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Prinsip tersebut menjadi penting dalam komunikasi partisipatif sebab keberhasilan komunikasi tidak hanya ditentukan dari tersampainya pesan, melainkan juga oleh adanya ruang dialog, pertukaran pengalaman, penyampaian aspirasi, dan pemberdayaan antarpihak (Tuft & Mefalopulos, 2009). Prinsip tersebut menjadi penting dalam pengelolaan yang melibatkan masyarakat, termasuk dalam pengembangan desa wisata.

Dalam konteks pengembangan desa wisata, komunikasi partisipatif menjadi penting karena pengelolaan desa wisata melibatkan berbagai pihak yang berbeda dalam hal kepentingan dan peran. Keberhasilan desa wisata tidak hanya ditentukan oleh potensi wisata, dukungan kebijakan, atau infrastruktur yang dimiliki, melainkan juga oleh kemampuan aktor lokal dalam membangun dialog, menciptakan ruang partisipasi, mengelola konflik, serta membangun kepercayaan publik. Komunikasi yang berlangsung secara berkelanjutan dapat membangun kedekatan dan kepercayaan yang

menentukan arah keberhasilan sebuah desa wisata (Hidayat & Purworini, 2025). Dalam proses tersebut, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) memiliki posisi strategis sebagai salah satu “unsur penggerak pengelola” dalam menciptakan lingkungan kondusif di tingkat lokal yang berdampak pada pengembangan destinasi pariwisata secara lebih luas (Cahyani dkk., 2024). Peran tersebut kemudian juga sejalan dengan konsep *community-based tourism* (pariwisata berbasis masyarakat), di mana masyarakat berperan besar dalam peningkatan kualitas pariwisata yang ada (Ahmad dkk., 2024). Hal ini menjadikan partisipasi masyarakat penting dan harus dilakukan secara berkelanjutan (Prayudi & Susilo, 2022).

Beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji komunikasi partisipatif dalam pengembangan ekowisata oleh Pokdarwis. Penelitian oleh Sari dkk. (2024) menyoroti komunikasi partisipatif di Desa Wisata Pela, Kutai Kartanegara dan menemukan bahwa Pokdarwis menerapkan empat indikator komunikasi partisipatif menurut Servaes meskipun beberapa aspek penerapannya masih belum maksimal. Kemudian, penelitian Firdausi dkk. (2024) menyoroti komunikasi partisipatif terkait program ekowisata di Kelurahan Bontang Baru, Kota Bontang, menunjukkan temuan serupa, yakni komunikasi partisipatif berjalan baik, tetapi beberapa aspek masih perlu ditingkatkan.

Beberapa penelitian terdahulu hanya melihat apakah komunikasi sudah berjalan, belum menjelaskan bagaimana komunikasi mendorong keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat. Belum

terdapat penelitian yang menjelaskan bagaimana komunikasi dialogis Pokdarwis membentuk hubungan organisasi dan publik, sehingga menghasilkan partisipasi masyarakat yang berkelanjutan pada desa wisata di daerah pesisir tropis.

Tidak hanya itu, penelitian terdahulu juga belum secara spesifik menyoroti konteks wisata pesisir atau bahari yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi berbeda, yang mayoritas masyarakatnya adalah nelayan dengan ketergantungan tinggi terhadap ekosistem laut. Kondisi ini yang menjadikan pendekatan partisipatif tidak hanya berorientasi pada partisipasi, tetapi juga pada kesadaran ekologis dan keberlanjutan lingkungan.

Kondisi tersebut relevan untuk dikaji di Desa Wisata Payung-Payung, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Desa ini berada di kawasan pesisir dengan ekosistem laut dan lingkungan alam sebagai daya tarik utama serta termasuk dalam kategori desa berkembang (JADESTA, 2024). Desa Wisata Payung-Payung juga memperoleh legitimasi formal melalui SK Desa Wisata dari Pemerintah Kabupaten Berau dan SK Desa Wisata Bahari dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (Pemprov Kaltim, 2024).

Dalam pengelolaannya, Desa Wisata Payung-Payung terorganisasi melalui Pokdarwis Batu Payung yang dibentuk pada tahun 2020. Pokdarwis membangun komunikasi dengan berbagai pihak, antara lain masyarakat lokal, Pemerintah Kampung Payug-Payung, Badan Usaha Milik Kampung (BUMK), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Berau, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Maratua Peduli Lingkungan (MPL), serta Pratasaba Resort. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata membutuhkan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan. Dalam memetakan keterlibatan tersebut, digunakan konsep Hexa Helix yang dalam hal ini mengelompokkan pemangku kepentingan ke dalam enam unsur, yaitu *government*, *academics*, *business*, *community*, *media*, dan *finansial institution/investor* (Sumarni dkk., 2025). Dalam konteks Desa Wisata Payung-Payung, pihak yang terlibat secara langsung mencakup unsur *community*, *government*, dan *business*, sementara unsur *media*, *academics* dan *finansial institution/investor* belum ditemukan terlibat secara langsung.

Komunikasi antarpemangku kepentingan tersebut diwujudkan melalui musyawarah, diskusi, pertukaran informasi, dan komunikasi melalui media digital. Tercatat sebanyak 13 kegiatan pengembangan desa wisata telah dilaksanakan oleh Pokdarwis Batu Payung, sedangkan musyawarah dilakukan minimal satu kali setiap semester atau ketika terdapat agenda penting yang perlu dibahas bersama. Kegiatan yang dilakukan mencakup pengelolaan operasional wisata serta kegiatan konservasi lingkungan bersama masyarakat dan mitra.

Capaian Desa Wisata Payung-Payung menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan lokasi penelitian. Desa ini secara konsisten masuk dalam 300 desa terpilih Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) selama tiga tahun berturut-turut, yaitu

2022-2024 (JADESTA, 2024), dan pada tahun 2025 berhasil menempati peringkat 15 nasional dalam Lomba Desa Wisata Nusantara (LDWN) (BerauTerkini.co.id, 2025). Capaian tersebut menarik untuk dilihat dari perspektif komunikasi karena pengembangan desa wisata melibatkan keterkaitan berbagai pihak. Salam dkk. (2024) menunjukkan bahwa komunikasi melalui berbagai program dan kerja sama dengan berbagai pihak menjadi bagian dalam pengembangan Desa Wisata Budaya di Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, yang memperoleh penghargaan ADWI pada 2021-2023.

Meskipun memiliki berbagai capaian, belum diketahui secara mendalam bagaimana proses komunikasi internal antara Pokdarwis Batu Payung dan masyarakat berlangsung, khususnya dalam memastikan partisipasi tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga terwujud dalam penyampaian suara, perencanaan, pengambilan keputusan, serta refleksi evaluasi. Kondisi masyarakat yang didominasi nelayan dan memiliki ketergantungan tinggi terhadap ekosistem laut juga menjadikan komunikasi partisipatif penting untuk melihat keterkaitan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Untuk memahami proses tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan komunikasi partisipatif dari Tufte & Mefalopulos (2009) yang terdiri dari *dialogue*, *voice*, *liberating pedagogy*, dan *action-reflection-action*. Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat bagaimana komunikasi antara Pokdarwis dan masyarakat berlangsung dalam proses pengembangan desa wisata. Selain itu, penelitian ini menggunakan *Dialogic Theory of*

Public Relations dari Kent & Taylor (2002) untuk melihat bagaimana Pokdarwis membangun hubungan dialogis dengan masyarakat sebagai publik melalui keterbukaan, pertukaran informasi, dan keterlibatan dalam proses komunikasi.

Dengan demikian, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana komunikasi partisipatif Pokdarwis Batu Payung dalam pengembangan Desa Wisata Payung-Payung, khususnya komunikasi antara Pokdarwis dan masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengidentifikasi komunikasi partisipatif yang dilakukan Pokdarwis Batu Payung dalam pengembangan Desa Wisata Payung-Payung, Kabupaten Berau.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus instrumental (*instrumental case study*). Sugiyono (2022) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu serta kelompok, menggambarkan masalah sosial maupun masalah kemanusiaan. Studi kasus instrumental dipilih karena kasus tersebut digunakan untuk memahami komunikasi partisipatif dalam pengembangan desa wisata secara lebih luas yang diterapkan pada Pokdarwis Batu Payung. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur, dengan jumlah informan 14 informan yang terdiri atas Ketua Pokdarwis Batu Payung,

Sekretaris Pokdarwis, Bendahara Pokdarwis, anggota Pokdarwis, masyarakat pemuda desa, masyarakat pelaku usaha (ketua UMKM, *tour guide*, dan pengelola *homestay*), Pemerintah Kampung Payung-Payung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau, Direktur BUMK, Ketua MPL, Fasilitator Lokal YKAN, serta Manajer Pratasaba Resort. Sumber data ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Data sekunder diperoleh melalui literatur, jurnal ilmiah, dan dokumentasi Pokdarwis. Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2022) yang terdiri dari empat komponen, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Keabsahan data menggunakan kriteria data menurut Sugiyono (2022), meliputi *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas). Uji *credibility* dilakukan melalui triangulasi, penggunaan bahan referensi, dan *member check*. **Triangulasi sumber** dilakukan dengan membandingkan informasi dari Pokdarwis Batu Payung, masyarakat lokal, pemerintah desa, termasuk mitra atau lembaga pendukung. **Triangulasi teknik** dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi pada sumber yang sama. **Triangulasi waktu** dilakukan pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi informasi. **Bahan referensi** berupa dokumentasi kegiatan dan rekaman wawancara digunakan untuk memperkuat data penelitian. Kemudian, *member check* dilakukan

dengan mengkonfirmasi hasil wawancara kepada informan. Sementara itu, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* dilakukan melalui penyajian konteks penelitian secara rinci, pencatatan proses penelitian, serta keterkaitan temuan dengan data wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Analisis terhadap komunikasi dalam penelitian ini difokuskan pada praktik komunikasi Pokdarwis Batu Payung dalam pengembangan Desa Wisata Payung-Payung selama periode 2022-2026.

Indikator Komunikasi Partisipatif: *Dialogue*

Dalam komunikasi partisipatif indikator *dialogue* mengacu pada proses komunikasi dua arah yang memungkinkan adanya pertukaran informasi, gagasan, dan pengalaman antarpihak, termasuk berperan dalam membangun kerja sama serta kesepahaman bersama di antara para pemangku kepentingan. Dalam pengembangan Desa Wisata Payung-Payung, dialog telah menjadi cara utama yang digunakan oleh Pokdarwis Batu Payung untuk berinteraksi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Interaksi tersebut terwujud dalam berbagai bentuk, seperti musyawarah, koordinasi kegiatan, diskusi informal, maupun komunikasi melalui media digital, dengan melibatkan masyarakat lokal, Pemerintah Kampung Payung-Payung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau, BUMK, MPL, YKAN, serta Pratasaba Resort.



Sumber: Arsip Pokdarwis Batu Payung, 2023

Gambar 1. Musyawarah Pengembangan Desa Wisata Payung-Payung

Dalam pelaksanaannya, Pokdarwis tidak hanya menyusun program secara internal, tetapi berupaya menjadikan musyawarah sebagai langkah awal sebelum suatu program dijalankan. Masyarakat dilibatkan sejak awal sebagai upaya untuk membangun kesepahaman, mengurangi potensi penolakan saat program dijalankan, termasuk juga mengakui masyarakat sebagai pihak yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman penting yang menentukan arah pengembangan desa wisata. Hal tersebut menunjukkan jika Pokdarwis tidak memosisikan dirinya sebagai satu-satunya aktor yang menjadi penentu arah pengembangan desa wisata.

“Biasanya ketika kami memiliki rencana kegiatan itu, biasanya terlebih dahulu kami diskusi dengan anggota. Tetapi beberapa masyarakat yang terlibat juga itu akan kami sampaikan juga bahwa dalam beberapa bulan ini kami memiliki kegiatan ini” (Wawancara, 5 Mei 2026).

Kemudian, musyawarah dan rapat umumnya dilaksanakan ketika terdapat program atau kegiatan yang perlu dibahas bersama. Ini menunjukkan bahwa pola yang terjadi bersifat situasional, bukan menjadi agenda rutin organisasi. Pola situasional ini di satu sisi menjadikan komunikasi lebih relevan dengan kebutuhan lapangan, tapi di sisi lain

menyebabkan sebagian masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan menjadi kurang mengikuti perkembangan desa wisata secara berkelanjutan. Kondisi yang terjadi juga menunjukkan bahwa forum komunikasi masih didominasi laki-laki dan kelompok usia dewasa, terutama pengurus Pokdarwis, pemerintah kampung, dan tokoh masyarakat. Sebaliknya, keterlibatan perempuan terbatas dan umumnya terjadi ketika pembahasan terkait kegiatan UMKM.

“Kadang informasi itu masih muter di orang-orang yang itu-itu aja. Jadi, beberapa anak muda yang agak pasif ngerasa agak ketinggalan info kalau nggak nanya duluan.” (Wawancara, 25 Mei 2026).

Temuan menunjukkan bahwa kesempatan berbicara belum menjamin pengaruh yang setara dalam pengambilan keputusan. Kelompok sosial dan pengalaman organisasi yang lebih tinggi cenderung lebih aktif menyampaikan pendapat dibandingkan dengan perempuan dan pemuda. Sehingga, tantangan komunikasi partisipatif di Desa Wisata Payung-Payung tidak hanya menyediakan ruang dialog, tetapi juga memastikan bahwa seluruh kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk memengaruhi keputusan. Menariknya, ketika muncul perbedaan pendapat, hal itu tidak dianggap sebagai hambatan komunikasi, melainkan sebagai bagian dari proses mencapai kesepahaman bersama. Adanya perbedaan pendapat justru menunjukkan jika forum dialog berjalan secara dinamis karena setiap pihak memiliki kesempatan untuk membawa kepentingan dan pandangannya masing-masing ke forum.

Kemudian, untuk hubungan dengan pemerintah kampung, Disbupar, MPL, YKAN, dan Pratasaba Resort cenderung berjalan aktif dan dua arah, bukan sekadar instruksi dari atas saja. Namun, berbeda halnya dengan BUMK, yang justru mengalami penurunan intensitas komunikasi sejak 2025 karena agenda bersama yang semakin jarang, keterlibatan mereka pun lebih banyak bersifat menunggu undangan daripada berinisiatif sendiri. Jadi, walaupun dialog telah terbangun lewat banyak forum dan melibatkan banyak pihak, pemerataan akses informasi bagi pemuda dan perempuan, termasuk menjaga hubungan yang konsisten dengan BUMK, masih menjadi tantangan dalam mewujudkan komunikasi partisipatif yang inklusif dan berkelanjutan.

Indikator Komunikasi Partisipatif: *Voice*

Indikator *voice* dalam komunikasi partisipatif melihat sejauh mana pihak diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, saran, maupun keluhan mengenai pengembangan desa wisata. Dalam konteks Desa Wisata Payung-Payung, aspirasi dapat disampaikan melalui musyawarah, sesi diskusi setelah pemaparan program, WhatsApp termasuk telepon. Namun, kondisi yang terjadi menunjukkan jika aktivitas komunikasi di grup WhatsApp mulai menurun dan sudah tidak aktif sejak tahun 2024. Padahal, dengan adanya saluran informal seperti WhatsApp dan telepon diakui menjadi sarana penting karena tidak semua masyarakat merasa nyaman atau berani untuk berbicara dalam forum resmi yang dihadiri oleh banyak orang.

Lebih lanjut, aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak hanya didengar, tetapi ada beberapa yang sudah direalisasikan menjadi program atau kegiatan. Seperti misalnya Dakayu Malatua Fest, kegiatan bersih pantai, termasuk pelatihan pemandu wisata berbasis kompetensi, semuanya lahir dari usulan masyarakat maupun anggota Pokdarwis, bukan sekadar keputusan sepihak Pokdarwis. Kesan serupa juga muncul dari pemangku kepentingan lain, yang mengaku usulan yang masuk selalu ditampung dan dipertimbangkan meskipun tidak semuanya bisa terealisasi akibat terbatasnya anggaran serta regulasi yang berlaku.

“Kalau ada beberapa usulan dari Pokdarwis itu ada memang beberapa itu yang bisa kami akomodir, dan juga saya juga tidak menutupi ada beberapa yang tidak bisa kami akomodir.”
(Wawancara, 5 Mei 2026).

Meskipun begitu, bukan berarti semua suara punya bobot yang sama. Hal yang menjadi tantangan indikator *voice* sendiri yakni masih terdapat sebagian masyarakat yang merasa kurang dilibatkan dalam kegiatan desa wisata, dan itu biasanya lebih karena miskomunikasi, bukan karena sengaja diabaikan, sehingga Pokdarwis pun berusaha merangkul pihak tersebut. Selain itu, keterlibatan pemuda pun masih terasa timpang, mereka lebih dominan pada tahap pelaksanaan kegiatan, seperti diminta membantu hal-hal teknis, misalnya dekorasi atau dokumentasi, dibandingkan tahap perencanaan dan pengambilan keputusan. Sehingga masalahnya bukan tidak ada pelibatan pemuda, tetapi belum seimbang bentuk keterlibatan yang diberikan.

Indikator Komunikasi Partisipatif: *Liberating Pedagogy*

Dalam komunikasi partisipatif, indikator *liberating pedagogy* merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat terhadap kondisi, potensi, dan permasalahan yang mereka hadapi melalui proses pembelajaran. Dalam pengembangan Desa Wisata Payung-Payung, proses pembelajaran terlihat dari berbagai pelatihan, pembinaan, sosialisasi, pendampingan, serta kegiatan belajar berbasis pengalaman yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah kampung, Disbupar, YKAN, dan MPL.

Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pembelajaran tidak hanya menjadi tanggung jawab Pokdarwis tetapi dilaksanakan secara kolaboratif. Materi yang diberikan pada saat pelatihan juga cukup beragam, mulai dari pelatihan *tour guide*, *housekeeping*, pelatihan bahasa Inggris, *public speaking*, media sosial, sertifikasi pemandu ekowisata, konservasi penyu, hingga pengembangan UMKM. Ada pula program studi tiru keluar daerah yang diberikan kepada Pokdarwis untuk mengamati pengelolaan desa wisata yang telah berkembang sehingga mereka memperoleh wawasan baru agar bisa disesuaikan dengan kondisi desa. Jadi, terlihat bahwa pembelajaran dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata yang dimiliki.



Sumber: Arsip Pokdarwis Batu Payung, 2024
Gambar 2. Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pemandu “Ekowisata”

Proses pembelajaran yang berlangsung juga cukup rutin, yakni 3-5 kali dalam setahun. Frekuensi pelatihan ini menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang ada. Dampaknya pun terlihat nyata pada perilaku sebagian masyarakat, yakni munculnya kesadaran terkait peluang yang bisa dimanfaatkan dari sektor pariwisata. Di mana masyarakat mulai sadar bahwa mereka dapat terlibat langsung dalam kegiatan wisata melalui *homestay*, jasa pemandu, maupun usaha ekonomi lainnya.

“Ada beberapa masyarakat yang memang sudah paham, sudah melihat peluang. Ada beberapa masyarakat yang sudah membuka homestay permanen, kemudian ada yang juga sudah mengembangkan bakat ke pemanduannya, bakat guidenya.”
 (Wawancara, 5 Mei 2026).

Meskipun demikian, manfaat ini belum dirasakan secara merata oleh sebagian masyarakat, pelaku usaha bahkan belum pernah sekalipun ikut pelatihan. Jadi, tantangan utama dalam proses pembelajaran bukan terletak pada kurangnya program pelatihan, melainkan pada pemerataan akses masyarakat terhadap kegiatan tersebut.

Indikator Komunikasi Partisipatif: *Action-Reflection-Action*

Indikator *action-reflection-action* dalam komunikasi partisipatif menekankan bahwa proses komunikasi tidak berhenti pada penyampaian gagasan maupun pelaksanaan kegiatan, tetapi ada refleksi atau evaluasi untuk melihat keberhasilan dan kekurangan program. Dalam hal ini Pokdarwis Batu Payung telah melaksanakannya melalui berbagai program sebagai dasar penyempurnaan kegiatan berikutnya, bersama dengan masyarakat dan juga pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan desa wisata. Pokdarwis umumnya melaksanakan evaluasi dalam rentang waktu 3-4 bulan dan tidak dilaksanakan secara langsung setelah kegiatan selesai. Pola tersebut menunjukkan bahwa evaluasi lebih banyak disesuaikan dengan agenda organisasi maupun ketersediaan waktu para pihak yang terlibat. Di sisi lain, rentang waktu tersebut berpotensi menyebabkan sebagian detail pelaksanaan kegiatan tidak lagi diingat secara lengkap oleh peserta evaluasi, sehingga proses refleksi dapat menjadi kurang mendalam.

Evaluasi ini, selain dilakukan oleh pengurus Pokdarwis, prosesnya juga melibatkan berbagai unsur seperti pemerintah kampung, para pemandu wisata, tokoh masyarakat, hingga pemuda, sehingga masukan yang terkumpul relatif beragam. Dalam pelaksanaan kegiatan, tentunya tidak semua program bisa berjalan sesuai rencana. Masih terdapat kendala, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Seperti misalnya durasi pelatihan yang kurang, anggaran terbatas, kondisi cuaca yang tidak menentu, hingga kehadiran peserta yang kurang. Sebagai upaya tindak lanjut

dari hasil evaluasi, Pokdarwis Batu Payung melakukan penguatan koordinasi dengan pemerintah maupun mitra yang bisa mendukung penyelesaian berbagai permasalahan di lapangan.

“Kami akan selalu evaluasi. Kegiatan-kegiatan yang masih kurang itu kami itu akan suarakan terus, entah itu ke NGO, entah itu ke pemerintah, atau dinas terkait.” (Wawancara, 11 Mei 2026).

Meskipun evaluasi sudah dilaksanakan dan melibatkan berbagai pihak, ternyata masih terdapat pihak yang belum dilibatkan dalam proses tersebut, yakni BUMK. Tidak dilibatkannya BUMK mengindikasikan bahwa hambatan utamanya disebabkan oleh ego sektoral ataupun *communication breakdown* sebagaimana yang diakui oleh Direktur BUMK sendiri. Padahal BUMK memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan destinasi wisata.

“Hambatan biasanya kita di ego sektoral, kadang ego lembaga masing-masing. Jadi merasa kita memiliki sesuatu yang lebih, sehingga rasa untuk kita sama-sama membangun desa wisata itu kurang.” (Wawancara, 21 Juni 2026).

Sehingga masalah yang muncul tidak selalu karena masalah teknis, tetapi bisa dipengaruhi oleh dinamika hubungan antarlembaga. Ego sektoral membuat proses evaluasi belum sepenuhnya menjadi ruang belajar bersama bagi seluruh pemangku kepentingan.

PEMBAHASAN

Komunikasi partisipatif Pokdarwis Batu Payung dalam pengembangan Desa Wisata Payung-Payung dapat dipahami sebagai proses yang tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan

informasi, tetapi juga sebagai ruang pelibatan masyarakat, pengembangan kapasitas, dan evaluasi kegiatan. Keempat indikator komunikasi partisipatif memperlihatkan keterhubungan antara proses komunikasi, penyampaian aspirasi, pembelajaran, dan tindakan dalam pengembangan desa wisata.

Pada indikator *dialogue*, keberadaan musyawarah, rapat, komunikasi informal, dan media digital menunjukkan bahwa komunikasi telah memberikan ruang bagi pertukaran pandangan antaraktor dalam pengembangan desa wisata. Namun, dialog tidak cukup dipahami berdasarkan keberadaan forum komunikasi. Makna dialog terletak pada adanya kesempatan untuk menyampaikan pendapat, memperoleh respons, melakukan pertukaran pandangan ketika terdapat perbedaan, serta adanya kemungkinan bahwa hasil pembahasan memengaruhi keputusan. Dalam konteks ini, pengalaman dan pengetahuan berbagai aktor menjadi bagian penting dalam pembahasan pengembangan desa wisata. Pokdarwis memiliki pengalaman dalam pengelolaan wisata, masyarakat memiliki pengetahuan mengenai kondisi sosial kampung, pelaku usaha memahami kebutuhan wisatawan, sedangkan pemerintah kampung dan mitra memiliki perspektif berdasarkan fungsi dan kepentingannya. Pertukaran berbagai pengetahuan tersebut membuat komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi menjadi proses dalam membangun pemahaman bersama.

Namun, keterbukaan ruang dialog belum sepenuhnya menghasilkan partisipasi yang inklusif

dan setara. Temuan penelitian memperlihatkan adanya ketidaksesuaian persepsi antara Pokdarwis sebagai penyampai informasi dan sebagian masyarakat sebagai penerima informasi terkait keterjangkauan informasi pengembangan desa wisata. Pokdarwis menyediakan berbagai saluran komunikasi, termasuk musyawarah, komunikasi langsung, dan WhatsApp, tetapi sebagian masyarakat menyatakan jika informasi terkadang masih berputar pada pihak yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan distribusi antara penyampaian dan penerimaan informasi. Persoalannya tidak serta-merta menunjukkan bahwa Pokdarwis tidak menyampaikan informasi secara merata, tetapi berkaitan dengan sejauh mana informasi dapat dijangkau, diterima, dan dipahami oleh masyarakat yang memiliki tingkat keterlibatan berbeda.

Kesenjangan tersebut juga terlihat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam forum rapat, Pokdarwis, khususnya ketua, masih menjadi pihak dominan dalam pembicaraan, sedangkan masyarakat umumnya lebih banyak bertanya. Forum lebih banyak melibatkan perwakilan masyarakat yang aktif dan memiliki kesadaran untuk hadir. Mekanisme tersebut dapat membantu koordinasi menjadi lebih efektif, tetapi pada saat yang sama membuat ruang komunikasi lebih sering diisi oleh kelompok yang sering terlibat. Selain itu, waktu pelaksanaan rapat sekitar pukul 10.00 atau 20.00 WITA dapat membatasi keterlibatan kelompok tertentu, terutama perempuan yang memiliki tanggung jawab domestik. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidakmerataan partisipasi

tidak selalu disebabkan oleh rendahnya kemauan masyarakat untuk terlibat, melainkan dapat berkaitan dengan mekanisme komunikasi dan kondisi sosial yang memengaruhi akses mereka terhadap ruang komunikasi.

Pada indikator *voice*, proses komunikasi dapat dipahami melalui tiga tahapan, yakni *voice access*, *voice expression*, dan *voice influence*. *Voice access* merujuk pada kesempatan masyarakat untuk memperoleh akses terhadap saluran komunikasi. Dalam pengembangan Desa Wisata Payung-Payung, Pokdarwis Batu Payung menyediakan berbagai saluran penyampaian aspirasi, melalui komunikasi langsung maupun media komunikasi seperti WhatsApp dan telepon. Keberagaman saluran komunikasi menunjukkan adanya upaya untuk menyediakan alternatif komunikasi yang tidak hanya bergantung pada forum formal. Namun, keberadaan forum tersebut belum sepenuhnya menghasilkan akses yang sama karena tidak semua kelompok memiliki tingkat keterlibatan yang sama dalam ruang komunikasi.

Selanjutnya, *voice expression*, berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk mengemukakan pendapat, keterbukaan, kritik, maupun usulan dalam ruang partisipasi. Masyarakat telah menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan kegiatan wisata, lingkungan, dan pengembangan kapasitas. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berada pada posisi sebagai penerima informasi, namun bisa juga menyampaikan pandangan terkait kebutuhan pengembangan desa wisata. Akan tetapi, kemampuan untuk mengekspresikan suara

belum sepenuhnya merata. Pemuda lebih sering terlibat pada tahap pelaksanaan kegiatan dibandingkan dalam proses perencanaan dan penyampaian gagasan. Perempuan juga lebih banyak terlibat dalam pembahasan yang berkaitan dengan UMKM, sementara keterlibatan dalam pembahasan pengembangan desa wisata masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap ruang komunikasi belum selalu diikuti kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan mengenai arah pengembangan desa wisata.

Sementara itu, *voice influence* melihat sejauh mana aspirasi yang disampaikan masyarakat dipertimbangkan dan berpengaruh terhadap keputusan atau program yang dijalankan. Beberapa aspirasi masyarakat memiliki keterkaitan dengan program yang dijalankan Pokdarwis, sehingga suara masyarakat tidak berhenti pada tahap penyampaian. Akan tetapi, tidak seluruh aspirasi dapat terealisasi karena adanya keterbatasan anggaran dan regulasi yang berlaku.

Di sisi lain, komunikasi partisipatif tidak hanya terlihat dari proses dialog dan penyampaian aspirasi, tetapi juga melalui pembelajaran. *Liberating pedagogy* dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai proses yang menghubungkan pengetahuan dengan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk bertindak. Proses tersebut terlihat melalui alur *knowledge, awareness, critical consciousness, agency, dan collective action*. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan mengenai potensi wisata dan pengelolaannya dapat menumbuhkan kesadaran

terhadap potensi dan persoalan lingkungan. Kesadaran tersebut kemudian dapat berkembang menjadi kemampuan masyarakat untuk mengambil tindakan dan terlibat dalam kegiatan bersama. Proses pembelajaran tersebut terlihat dapat meningkatkan kapasitas masyarakat serta kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan wisata dan pelestarian lingkungan. Namun, akses terhadap proses pembelajaran belum sepenuhnya merata karena masih terdapat masyarakat yang belum memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas.

Sementara itu, *action-reflection-action* memperlihatkan bahwa evaluasi dapat dipahami sebagai bagian dari *communicative learning cycle*, bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi bisa menjadi ruang komunikasi tempat semua aktor bisa saling belajar bersama. Siklus diawali dengan *action*, yakni ketika program dilaksanakan. Pengalaman dan kendala yang muncul kemudian dibahas melalui *dialogue* untuk melihat apa yang sudah berjalan dan apa yang masih perlu diperbaiki. Pembahasan tersebut menghasilkan *collective reflection* ketika berbagai pihak berusaha memahami pengalaman dan masalah yang muncul. Hasil refleksi selanjutnya digunakan untuk melakukan *negotiation/adaptation*, yakni menentukan bagian yang perlu dipertahankan atau diperbaiki sebelum diterapkan kembali sebagai *new action*. Proses ini berulang karena tindakan baru menghasilkan pengalaman baru yang membentuk siklus pembelajaran yang berkelanjutan. Namun, belum dilibatkannya BUMK menunjukkan bahwa proses refleksi

bersama belum sepenuhnya mencakup seluruh aktor yang berkepentingan.

Keempat aspek tersebut menunjukkan bahwa komunikasi partisipatif Pokdariws Batu Payung telah berkembang dari komunikasi yang berorientasi pada penyampaian informasi menuju komunikasi yang lebih dialogis dan partisipatif. Namun, perkembangan tersebut belum sepenuhnya menghasilkan komunikasi yang inklusif dan merata. Perbedaan persepsi antara Pokdarwis dan masyarakat terkait keterjangkauan informasi, keterlibatan perempuan dan pemuda yang belum merata, serta menurunnya intensitas komunikasi antara Pokdarwis dan BUMK menunjukkan adanya *communication gap* dalam ekosistem *stakeholder* desa wisata. Dengan demikian, kesenjangan komunikasi tidak hanya terjadi antara penyampai dan penerima informasi, melainkan juga dapat muncul dalam hubungan antaraktor ketika pertukaran informasi, koordinasi, dan keterlibatan tidak berlangsung secara berkelanjutan.

Kondisi tersebut dapat dianalisis lebih lanjut melalui *Dialogic Theory of Public Relations* dari Kent dan Taylor (2002) yang terdiri dari empat prinsip, yakni *mutuality*, *propinquity*, *empathy*, *risk*, dan *commitment*. Prinsip *mutuality* terlihat dari adanya hubungan timbal balik ketika masyarakat dan pemangku kepentingan diberi kesempatan menyampaikan pandangan dan sebagian aspirasi menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan program. Akan tetapi, perbedaan tingkat keterlibatan menunjukkan bahwa hubungan timbal balik tersebut belum sepenuhnya menghasilkan daya pengaruh yang

merata. Prinsip *propinquity* juga memperlihatkan bahwa kedekatan dengan proses pengambilan keputusan masih berbeda antaraktor, terutama ketika terdapat kelompok yang lebih sering hadir dalam forum dibandingkan dengan kelompok lain. Prinsip *empathy* menjadi penting karena setiap kelompok memiliki kebutuhan, pengalaman, dan hambatan yang berbeda, sehingga pola komunikasi yang sama belum tentu menghasilkan tingkat partisipasi yang sama. Prinsip *risk* dapat dilihat dari adanya keterbukaan terhadap perbedaan pandangan dalam proses komunikasi. Perbedaan tidak selalu menjadi tanda kegagalan komunikasi, tetapi dapat menjadi bagian dari proses negosiasi untuk memperoleh penyelesaian bersama. Dan aspek yang terakhir, *commitment* berkaitan dengan keberlanjutan hubungan dialogis. Komunikasi Pokdarwis dengan beberapa pemangku kepentingan relatif tetap terpelihara, sedangkan hubungan dengan BUMK mengalami penurunan intensitas. Kondisi tersebut memperlihatkan jika komitmen dialogis belum sepenuhnya terpelihara pada seluruh hubungan antarorganisasi.

Hubungan Pokdarwis dan BUMK dalam konteks tersebut lebih tepat dipahami sebagai persoalan *interorganizational communication*, bukan hanya sebagai ego sektoral. Kedua lembaga tersebut memiliki kepentingan yang saling berkaitan dalam pembangunan desa, sehingga membutuhkan pertukaran informasi, koordinasi, dan pemahaman bersama secara berkelanjutan. Ketika komunikasi tidak terpelihara secara konsisten, informasi dan perspektif BUMK tidak termasuk dalam proses pembelajaran dan

pengambilan keputusan Pokdarwis. Hal ini menunjukkan adanya *communication breakdown* dalam hubungan antarlembaga yang dapat memengaruhi keberlanjutan kolaborasi antarlembaga.

Dalam perspektif *community relations*, kualitas hubungan Pokdarwis dengan masyarakat dan pemangku kepentingan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya forum komunikasi, tetapi juga oleh kemampuan mempertahankan komunikasi, merespons aspirasi, dan membangun kepercayaan. Ketika aspirasi masyarakat memperoleh respons dan sebagian dapat direalisasikan menjadi program, masyarakat memiliki ruang untuk melihat bahwa kontribusinya dihargai dalam pengembangan desa wisata. Sebaliknya, keterbatasan akses, keterlibatan yang belum merata, dan hubungan antarorganisasi yang tidak berkelanjutan menunjukkan bahwa kualitas hubungan masih perlu diperkuat.

Dalam keseluruhan proses tersebut, Pokdarwis memiliki posisi sebagai *communication facilitator* karena menghubungkan masyarakat dengan pemerintah, mitra, pihak swasta, dan aktor lain. Pokdarwis juga berperan sebagai *relationship builder* karena pengembangan desa wisata membutuhkan hubungan yang terus terpelihara, bukan hanya komunikasi ketika terdapat kegiatan. Selain itu, Pokdarwis berfungsi sebagai *community mobilizer* karena menghubungkan pengetahuan, aspirasi, dan kapasitas masyarakat dengan tindakan pengembangan desa wisata.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Satria dkk. (2024) yang menunjukkan pentingnya

komunikasi dan dialog dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Penelitian ini memperlihatkan bahwa dialog tidak hanya menjadi tempat pertukaran informasi, tetapi berkaitan dengan bagaimana aspirasi memperoleh respons, termasuk bagaimana hubungan antaraktor dipertahankan. Temuan ini juga sejalan dengan Sobra dkk. (2023) dan Sari dkk. (2024) terkait pentingnya ruang penyampaian aspirasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan ruang aspirasi belum otomatis menghasilkan partisipasi yang merata karena masih terdapat perbedaan akses, ekspresi, dan pengaruh suara antarkelompok. Temuan mengenai pemuda juga memperkuat penelitian Nursania dkk. (2023) bahwa keterlibatan yang lebih banyak berada pada tahap pelaksanaan belum sepenuhnya menunjukkan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, komunikasi partisipatif Pokdarwis Batu Payung telah bergerak menuju partisipatif, tetapi belum sepenuhnya inklusif. Kekuatan utamanya terletak pada adanya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, memperoleh peningkatan kapasitas, dan terlibat dalam pelaksanaan pengembangan desa wisata. Sementara itu, tantangannya terletak pada akses yang tidak merata terhadap ruang komunikasi, dominasi aktor tertentu dalam forum, akses pembelajaran yang belum merata, serta komunikasi antarlembaga tertentu yang belum berkelanjutan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tantangan komunikasi partisipatif di Desa Wisata

Payung-Payung ke depan bukan lagi sekadar menyediakan ruang komunikasi, tetapi perlu memastikan bahwa informasi yang disampaikan benar-benar dapat dijangkau, diterima, dipahami, direspons, dan memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga, penguatan komunikasi partisipatif perlu diarahkan pada terciptanya proses komunikasi yang memungkinkan lebih banyak kelompok memperoleh akses informasi, menyampaikan suara, memengaruhi keputusan, termasuk terlibat dalam proses pembelajaran dan evaluasi bersama.

Dalam konteks wilayah pesisir tropis, komunikasi partisipatif berperan penting dalam menghubungkan pengetahuan lokal, kapasitas masyarakat, kepentingan kelembagaan, dan pengelolaan potensi wilayah. Keragaman masyarakat dan aktor yang terlibat membuat komunikasi partisipatif tidak hanya berfungsi sebagai sarana keterlibatan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk membangun kapasitas, mengelola perbedaan kepentingan, dan menjaga hubungan antarpihak dalam pengembangan wilayah pesisir secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Dalam pengembangan Desa Wisata Payung-Payung, komunikasi partisipatif yang dilakukan oleh Pokdarwis Batu Payung sudah berjalan melalui keempat indikator komunikasi partisipatif dari Tufte dan Mefalopulos (2009). Komunikasi yang terjadi telah berkembang menuju pola komunikasi dialogis yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pengembangan desa wisata. Keterlibatan tersebut tercermin

melalui musyawarah, rapat koordinasi, komunikasi informal, penyampaian aspirasi, pelatihan, serta evaluasi program. Meskipun demikian, kualitas partisipasinya belum sepenuhnya inklusif dan setara. Kesenjangan keterlibatan pemuda dan perempuan, serta melemahnya komunikasi Pokdarwis dan BUMK, menunjukkan bahwa keberadaan ruang dialog belum selalu identik dengan distribusi *voice* dan daya pengaruh yang merata antaraktor. Kolaborasi telah terbangun, tetapi komunikasi antarorganisasi masih menunjukkan adanya *communication gap* dalam ekosistem *stakeholder* desa wisata. Pembelajaran juga mendorong perubahan perilaku berupa meningkatnya kesadaran terhadap pelestarian lingkungan dan pemanfaatan potensi lokal, sementara evaluasi kegiatan menjadi bagian dari proses refleksi dan perbaikan untuk kegiatan selanjutnya.

Maka dari itu, komunikasi partisipatif dalam pengembangan Desa Wisata Payung-Payung perlu terus diperkuat melalui ruang komunikasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pokdarwis Batu Payung dapat memperluas distribusi informasi melalui berbagai saluran komunikasi serta memberikan ruang yang lebih besar bagi pemuda dan perempuan untuk terlibat sejak tahap perencanaan hingga pengambilan keputusan. Mekanisme umpan balik juga perlu diperkuat agar informasi yang disampaikan tidak hanya diterima, tetapi bisa dipahami dan direspons oleh masyarakat. Selain itu, komunikasi antara Pokdarwis dan BUMK perlu dilakukan secara rutin agar koordinasi tidak hanya berlangsung ketika

terdapat kegiatan bersama. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam menggali proses penerimaan dan pemahaman informasi pada masyarakat dengan tingkat keterlibatan yang berbeda. Bagi peneliti selanjutnya, kajian dapat dikembangkan dengan melihat pemanfaatan media digital dalam memperluas partisipasi masyarakat serta mengkaji lebih dalam keterlibatan pemuda dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan pada pengembangan desa wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. J., Hakim, L., Mustari, N., & Fatmawati. (2024). Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Pariwisata Melalui Partisipasi Masyarakat. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(1), 252–261. <https://doi.org/https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i1.3113>
- BerauTerkini.co.id. (2025). Desa Wisata Payung-Payung Masuk 15 Besar LDWN. *Berauterkini.Co.Id*. <https://berauterkini.co.id/desa-wisata-payung-payung-masuk-15-besar-ldwn/>
- Cahyani, D. L., Murianto, & Putra, I. N. T. (2024). STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) DI DESA BATU KUMBUNG, KECAMATAN LINGSAR, KABUPATEN LOMBOK BARAT. *Journal Of Responsible Tourism*, 3(8), 1189–1200. <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jrt.v3i3.3176>
- Effendi, E., Valentiyo, A., Harahap, A. Z., Pohan, I. Y., & Aulia, M. F. (2024). Model dan Proses Komunikasi. *Dawatuna Journal of Communiation and Islamic Broadcasting*, 4(3), 1081–1087. <https://doi.org/DOI:10.47467/dawatuna.v4i3.513>
- Firdausi, H. A. N., Juwita, R., & Boer, K. M. (2024). Komunikasi Partisipatif Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Terkait Program Ekowisata di Kelurahan Bontang Baru Kota Bontang. *Jurnal Indonesia: Manajemen*

- Informatika Dan Komunikasi*, 5(1), 163–182.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35870/jimik.v5i1.439>
- Hidayat, R., & Purworini, D. (2025). Peran Komunikasi Dialogis dan Modal Sosial dalam Pengembangan Desa Wisata Rotan Trangsan, Jawa Tengah. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 7(1), 140–157.
<https://doi.org/10.25008/jpi.v7i1.198>
- JADESTA. (2024). *Desa Wisata Payung-payung*. Jadesta.Kemenparekraf.Go.Id.
<https://jadesta.kemenpar.go.id/desa/payungpayung>
- Kent, M. ., & Taylor, M. (2002). Toward a Dialogic Theory of Public Relations. *Public Relations Review*, 28(1), 21–37.
- Nursania, A. A., Purwanti, S., & Arsyad, A. W. (2023). KOMUNIKASI PARTISIPATIF DALAM PROGRAM ‘BETTER LIVING IN MALAHING’ OLEH PT PUPUK KALTIM DI KOTA BONTANG. *EJournal Ilmu Komunikasi*, 11(3), 93–107.
- Pemprov Kaltim. (2024). *Kondisi dan Wilayah*. Kaltimprov.Go.Id.
<https://kaltimprov.go.id/kondisiwilayah>
- Prayudi, & Susilo, M. E. (2022). Sustainable Tourism in Sleman, Indonesia:Government Communication Strategy in Empowering Community through the Development of Tourism Village. *The Indonesian Journal of Communication Studies*, 15(2), 87–104.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31315/ijcs.v15i2.5993>
- Salam, N. E., Yasir, Y., Firdaus, M., Awza, R., & Lubis, E. E. (2024). Komunikasi Pariwisata Berbasis Komunitas untuk Pengembangan Desa Wisata Budaya di Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Riset Komunikasi (JURKOM)*, 7(1), 159–174.
- Sari, R., Rohmah, A. N., & Nurliah. (2024). Komunikasi Partisipatif Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dalam Pengembangan Ekowisata Desa Wisata Pela. *EJournal Ilmu Komunikasi*, 12(2), 102–111.
- Satria, M. D., Subhani, & Ginting, R. P. (2024). Participatory Communication in Community-Based Tourism Development in Bireuen. *Journal of Ecohumanism*, 3(7), 2127–2130.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62754/joe.v3i7.4364>
- Sobra, H., Nurjanah, & Yesicha, C. (2023). Komunikasi Partisipatif Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Pengembangan Wisata Air Terjun Batu Dinding. *Journal of Communication Studies*, 5(1), 25–35.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/kjcs.v5i1.25612>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. ALFABETA.
- Sumarni, N., Nasihin, I., Arisandi, V., & Fajrin, Y. (2025). Strategi Kolaborasi Hexahelix Dalam Membangun Pariwisata Karawang. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, Dan Manajemen Bisnis*, 5(3), 849–859.
- Tufte, T., & Mefalopulos, P. (2009). *Participatory Communication: A Practical Guide*. Word Bank.